

# Implementasi Kebijakan Afirmatif Beasiswa Daerah: Hambatan Struktural dan Risiko Eksklusi DTKS pada Program Sepuluh Sarjana per Desa di Kabupaten Bojonegoro

Rizal Muhaimin

Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri Bojonegoro

E-mail: [Rzlmhn23@gmail.com](mailto:Rzlmhn23@gmail.com)

---

## Article Info

### Article history:

Received April 26, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted May 24, 2026

---

### Keywords:

Affirmative Policy, Regional Scholarship, Higher Education, DTKS, Bojonegoro.

---

## ABSTRACT

The "Ten Bachelors Per Village" Scholarship Program is an affirmative policy implemented by the Bojonegoro Regency Government to expand access to higher education and improve the quality of rural Human Resources (HR) in the post-oil era. However, its implementation faces bureaucratic hurdles and regulatory transitions. This study aims to analyze the effectiveness, structural barriers, and sociological implications of the scholarship program's regulatory shifts in Bojonegoro Regency. Utilizing a descriptive qualitative approach, data were gathered through in-depth interviews, observation, and document analysis involving executive actors (Education Agency), overseers (Regional Parliament), and beneficiaries. The findings indicate that on a macro level, the program has successfully accelerated the regional Human Development Index (HDI). Nevertheless, at the micro level, quota absorption disparities persist among villages due to gaps in information literacy. The primary structural obstacles stem from slow manual verification processes, delayed budget disbursement by the bureaucracy, and a reimbursement payment scheme that burdens low-income students. Furthermore, the regulatory transition toward Regent Regulation No. 42 of 2025, which integrates the grant into the Poor Family Scholarship based on the Integrated Social Welfare Data (DTKS), risks causing exclusion errors for factually poor students due to inaccurate population database updates. This study recommends transforming the manual claim system into direct cooperation with partner universities and strengthening factual validation at the village level.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



---

## Article Info

### Article history:

Received April 26, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted May 24, 2026

---

### Keywords:

Kebijakan Afirmatif, Beasiswa Daerah, Pendidikan Tinggi, DTKS, Bojonegoro.

---

## ABSTRAK

Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa merupakan kebijakan afirmatif Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) perdesaan pasca-era migas. Namun, implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala birokrasi dan transisi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas, hambatan struktural, serta implikasi sosiologis dari perubahan regulasi program beasiswa tersebut di Kabupaten Bojonegoro. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap aktor pelaksana (Dinas Pendidikan), pengawas (DPRD), serta penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara makro program ini berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah. Kendati demikian, pada level mikro terdapat disparitas serapan kuota antardesa akibat kesenjangan literasi informasi. Hambatan utama bersumber dari prosedur verifikasi fisik yang lambat, keterlambatan pencairan dana oleh birokrasi, serta skema pembayaran reimbursement yang memberatkan mahasiswa kurang mampu. Lebih lanjut, transisi regulasi

menuju Perbup Nomor 42 Tahun 2025 yang mengintegrasikan bantuan ke dalam Beasiswa Keluarga Miskin berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berisiko memunculkan celah pengucilan bagi warga miskin riil akibat tidak akuratnya pemutakhiran data kependudukan. Penelitian ini merekomendasikan transformasi sistem klaim manual menjadi kerja sama langsung dengan universitas mitra serta penguatan validasi faktual di tingkat desa.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



**Corresponding Author:**

Rizal Muhaimin  
Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri Bojonegoro  
E-mail: [Rzlmhn23@gmail.com](mailto:Rzlmhn23@gmail.com)

## **Pendahuluan**

Pendidikan tinggi menduduki posisi sebagai pilar utama dalam eskalasi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus bertindak selaku katalisator penggerak pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu daerah. Jenjang perguruan tinggi tidak sekadar mencetak tenaga kerja siap pakai, namun juga memproduksi agen perubahan yang memiliki kapasitas intelektual dalam memecahkan problematika sosial di masyarakat. Konteks urgensi mutu SDM ini sangat relevan jika disandingkan dengan Kabupaten Bojonegoro, sebuah wilayah di Provinsi Jawa Timur yang dikenal memiliki lompatan fiskal luar biasa. Ditopang oleh masifnya sektor minyak dan gas bumi (migas), khususnya dari Blok Cepu, Kabupaten Bojonegoro berhasil menempatkan diri sebagai daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar kedua di Jawa Timur (Di & Blora, 2023).

Sisi kekuatan finansial yang melimpah ini idealnya berbanding lurus dengan tingginya investasi pada sektor pendidikan guna menciptakan fondasi ekonomi yang berkelanjutan di era pasca-migas (post-oil era). Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya sebuah paradoks pembangunan. Kelimpahan berkah sumber daya alam (SDA) belum sepenuhnya selaras dengan akselerasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta tingkat partisipasi pendidikan tinggi, terutama di wilayah pelosok desa. Berdasarkan data makro, sebaran angka putus sekolah maupun keterbatasan kelompok masyarakat perdesaan untuk menembus bangku kuliah di Bojonegoro masih didominasi oleh kendala ekonomi klasik dan keterbatasan akses geografis (Wulandari et al., 2025).

Struktur sosial masyarakat perdesaan cenderung melihat pendidikan tinggi sebagai beban biaya alih-alih sebagai instrumen investasi masa depan. Kesenjangan struktural antara kekuatan fiskal daerah yang masif di satu sisi, dan rendahnya penetrasi pendidikan tinggi di tingkat akar rumput di sisi lain, memicu lahirnya kebutuhan akan intervensi kebijakan publik yang bersifat afirmatif, radikal, dan tepat sasaran. Menjawab tantangan jaminan pendidikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro merumuskan sebuah kebijakan inovatif yang dikenal dengan Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa. Secara historis, program ini merupakan bentuk ekspansi struktural dari kebijakan periode sebelumnya, yakni "Beasiswa Dua Sarjana Per Desa" yang pertama kali diinisiasi melalui Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2019.

Seiring peningkatan kapasitas APBD dan kebutuhan daerah, regulasi tersebut mengalami serangkaian transformasi yuridis formal hingga ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 (*PERBUB No 17, 2019*). Kebijakan afirmatif ini menggariskan komitmen negara di tingkat lokal untuk membiayai penuh pemuda-pemudi di setiap desa hingga menyelesaikan studi sarjana mereka. Target utama dari beasiswa ini mencakup dua dimensi strategis: meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu (miskin) dan mendorong keterwakilan wilayah guna memastikan distribusi pengetahuan merata hingga ke batas-batas terluar kabupaten. Meskipun instrumen kebijakan ini memuat niat luhur yang disambut secara antusias oleh ribuan mahasiswa, fase implementasi di lapangan tidak luput dari dinamika dan hambatan birokrasi.

Teori kebijakan publik menyebutkan bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh kualitas formulasi hukumnya, tetapi sangat bergantung pada bagaimana mekanisme implementasi tersebut dikelola oleh para aktor pelaksana. Dalam konteks jaminan pendidikan tinggi di Bojonegoro, berbagai studi awal mengidentifikasi adanya sejumlah "batu sandungan", seperti rumitnya verifikasi berkas administrasi secara manual, ketidakmerataan kuota serapan antar-desa akibat perbedaan akses informasi, hingga problem ketepatan waktu pencairan dana yang kerap kali menghambat studi mahasiswa (Sari et al., 2026).

Terlebih, dinamika regulasi terbaru menunjukkan adanya arah transisi kebijakan baru lewat Perbup Nomor 42 Tahun 2025, yang memindahkan skema beasiswa ini ke dalam kluster Beasiswa Keluarga Miskin secara terintegrasi (Dinas Pendidikan Bojonegoro, diakses dari situs <https://share.google/bHPAq5cBE8Pw7qaFx>). Berdasarkan latar belakang tersebut, evaluasi kritis dan analisis mendalam mengenai efektivitas serta dampak pelaksanaan kebijakan ini menjadi sangat krusial untuk dipetakan. Kajian ilmiah ini bertujuan untuk membedah secara komprehensif bagaimana implementasi Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari perspektif administrasi publik, mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan (*enabling factors*) maupun hambatan struktural yang muncul, serta memberikan rekomendasi taktis demi keberlanjutan investasi SDM perdesaan di masa mendatang.

## **Metode**

### **Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis (Waruwu, 2024). Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada karakteristik fokus penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi, memahami, dan membedah secara mendalam dinamika implementasi Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro. Melalui pendekatan deskriptif, peneliti dapat menggambarkan realitas empiris di lapangan secara sistematis mengenai bagaimana proses birokrasi, mekanisme pencairan anggaran, hambatan verifikasi, serta dampak transisi regulasi terjadi tanpa melakukan manipulasi terhadap objek yang diteliti (Wijaya et al., 2018). Pendekatan ini sangat relevan untuk mengurai jalinan hubungan antar-aktor kebijakan, baik eksekutif (Dinas Pendidikan), legislatif (DPRD), maupun masyarakat selaku penerima manfaat.

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah administrasi Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Bojonegoro memiliki karakteristik fiskal yang unik, yakni sebagai daerah penghasil migas dengan APBD terbesar kedua di Jawa Timur, namun masih menghadapi tantangan sebaran kualitas SDM di tingkat perdesaan (Wulandari et al., 2025). Fokus pengumpulan data berpusat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro selaku instansi pelaksana teknis (leading sector), Kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro (khususnya Komisi C) selaku pengawas kebijakan, serta beberapa desa sampel di wilayah perdesaan pinggiran yang mencatatkan angka serapan kuota beasiswa yang rendah. Penelitian ini dijadwalkan dan dilaksanakan pada bulan April - Mei tahun 2026.

### **Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama (Moleong & Surjaman, 1989), yaitu :

#### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) kepada para informan kunci (key informants) (Wijaya, n.d.). Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yang meliputi Kepala Bidang Pendidikan Tinggi Dinas Pendidikan Bojonegoro, Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro, Kepala Desa di wilayah sampel, serta perwakilan mahasiswa aktif penerima program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa.

#### **2. Data Sekunder**

Merupakan data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung untuk memperkuat analisis. Data sekunder dalam kajian ini mencakup dokumen regulasi formal (Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2025), data statistik capaian IPM Bojonegoro, laporan realisasi serapan anggaran Dinas Pendidikan, arsip berita pemanggilan DPRD, serta literatur ilmiah berupa jurnal dan skripsi terdahulu yang relevan (Di & Blora, 2023).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menjaga keabsahan dan kedalaman data, teknik pengumpulan data dilakukan melalui skema triangulasi metode yang meliputi tiga instrumen, yaitu:

#### **1. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview)**

Dilakukan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur guna menggali perspektif informan terkait hambatan administratif, transparansi jangka waktu pencairan, hingga problem integrasi DTKS.

#### **2. Observasi Lapangan**

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses pelayanan administrasi penyerahan berkas fisik di loket Dinas Pendidikan serta mencermati dinamika komunikasi yang terbangun antara petugas dan pemohon beasiswa (Oktaviani & Rosdiana, 2025).

#### **3. Studi Dokumentasi**

Dilakukan dengan cara menghimpun, mengklasifikasikan, dan menganalisis teks hukum serta laporan kuantitatif serapan anggaran guna mencocokkan kesesuaian antara regulasi di

atas kertas dan realitas implementasi. Teknik Analisis Data Proses analisis data dalam penelitian ini mengadopsi model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang terdiri dari tiga tahapan utama yang berjalan secara sirkular (Kalpokaite, 2019):

**[Pengumpulan Data] → [Kondensasi Data] → [Penyajian Data] → [Penarikan Kesimpulan]**

1. Kondensasi Data (Data Condensation)

Proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan dan transkrip wawancara ke dalam kluster-kluster isu strategis (misal: kluster hambatan sistem reimbursement, kluster pengawasan DPRD, kluster problem DTKS).

2. Penyajian Data (Data Display)

Menyusun narasi data yang telah dikondensasikan ke dalam bentuk teks deskriptif, bagan alur birokrasi, atau matriks komparasi regulasi agar mudah dipahami secara logis dan sistematis.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Merumuskan makna dari data yang disajikan, mencari pola hubungan, dan melakukan pengujian kembali (verifikasi) sepanjang penelitian berlangsung untuk menghasilkan kesimpulan akhir yang sah dan terpercaya mengenai efektivitas implementasi kebijakan.

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis Capaian Efektivitas Program Terhadap Peningkatan IPM dan Distribusi Pengetahuan Perdesaan

Implementasi Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro (secara populer dikenal sebagai Program SESAR) secara konseptual merupakan bentuk affirmative action (kebijakan afirmatif) yang dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural melalui investasi sektor pendidikan tinggi. Intervensi fiskal ini menjadi sangat mendesak mengingat posisi Bojonegoro sebagai daerah dengan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar kedua di Jawa Timur yang didominasi oleh bagi hasil sektor minyak dan gas bumi (migas) Blok Cepu. Jika ditinjau dari kriteria pencapaian makro, kebijakan yang diatur secara formal melalui Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2023 ini berhasil mendorong peningkatan angka partisipasi kuliah bagi pemuda-pemudi di tingkat desa secara signifikan. Keberadaan program ini berkontribusi langsung pada akselerasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bojonegoro yang merangkak naik ke zona kategori tinggi. Bantuan biaya pendidikan penuh memberikan dorongan psikologis dan finansial yang kuat bagi keluarga perdesaan yang semula menganggap perkuliahan sebagai komoditas mahal yang tidak terjangkau (Oktaviani & Rosdiana, 2025).

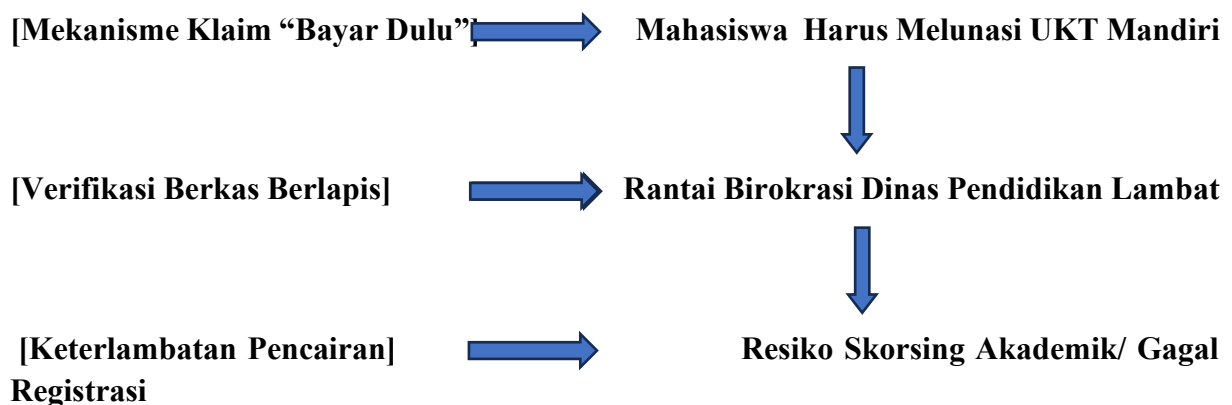
Namun, jika efektivitas program ini dibedah menggunakan pendekatan evaluasi model CIPP (Context, Input, Process, Product), tampak jelas bahwa output atau produk yang dihasilkan belum terdistribusi secara adil secara spasial. Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, pagu anggaran jumbo sebesar Rp 34,6 miliar yang digelontorkan pemerintah daerah nyatanya masih menyisakan sisa kuota yang tidak terserap optimal di

beberapa klaster kecamatan (Oktaviani & Rosdiana, 2025). Sebagai contoh konkret, di wilayah Kecamatan Kepohbaru, dari total target ideal kuota yang disediakan, realisasi serapan hanya menyentuh angka 198 mahasiswa (sekitar 79,2%), sehingga menyisakan celah sisa kuota sebesar 20,8%. Fenomena ketimpangan ini memunculkan paradoks distribusi pengetahuan :

- a. Klaster Desa Maju (Pusat Pertumbuhan): Mengalami surplus pendaftar karena didukung oleh tingginya literasi digital masyarakat, kedekatan geografis dengan pusat informasi, serta kesiapan dokumen akademik dari lulusan sekolah menengah setempat.
- b. Klaster Desa Tertinggal/Pinggiran (Kawasan Border): Sering kali gagal memenuhi kuota kuantitatif "sepuluh sarjana" akibat minimnya penetrasi sosialisasi dan rendahnya daya saing akademik anak-anak pelosok untuk menembus standar akreditasi kampus yang dipersyaratkan oleh regulasi (Sari et al., 2026).

### **Hambatan Struktural: Birokrasi Manual, Problem Akreditasi, dan Paradoks "Bayar Dulu"**

Jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik model George Edwards III, keberhasilan suatu program bersandar pada empat pilar utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hambatan paling krusial dalam program SESAR berada pada pilar struktur birokrasi dan komunikasi operasional. Proses pengajuan bantuan yang sebagian besar masih mengandalkan mekanisme verifikasi berkas fisik (manual) memaksa mahasiswa untuk bolak-balik mengantarkan proposal administrasi ke loket Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Model pelayanan konvensional ini menciptakan pemborosan waktu dan biaya (ongkos transportasi), terutama bagi putra-putri daerah asal Bojonegoro yang tengah menempuh studi di luar kota seperti Surabaya, Malang, atau Yogyakarta (*PERBUB No 17, 2019*). Lebih jauh lagi, terdapat tiga determinan hambatan teknis yang secara akumulatif mengunci akses masyarakat rentan terhadap program ini:



#### 1. Persyaratan Standar Akreditasi Institusi.

Regulasi membatasi bahwa penerima beasiswa wajib menempuh studi di perguruan tinggi dengan klaster akreditasi tertentu. Aturan ini bermaksud menjaga mutu, namun di sisi lain mengeliminasi mahasiswa miskin pelosok yang hanya mampu menembus kampus-kampus swasta lokal dengan akreditasi madya (Di & Blora, 2023).

#### 2. Skema Penagihan Berbasis Kuitansi (Reimbursement)

Aturan operasional mewajibkan mahasiswa untuk terlebih dahulu membayar lunas Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara mandiri ke pihak universitas, baru kemudian kuitansi tersebut diserahkan ke Pemkab untuk proses klaim pencairan dana. Ketentuan ini memicu paradoks besar; mahasiswa dari keluarga miskin yang sama sekali tidak memegang modal finansial di awal semester otomatis tereliminasi sejak tahap awal karena ketidakmampuan menebus biaya operasional awal tersebut (Wulandari et al., 2025).

### 3. Lamanya Rantai Komunikasi Birokrasi.

Jalur koordinasi dari Dinas Pendidikan ke tingkat kecamatan hingga aparat desa masih mengandalkan pola surat-menyurat formal tanpa didukung keberadaan saluran interaksi digital terpadu seperti helpdesk atau aplikasi respons cepat. Akibatnya, ketika mahasiswa mengalami penolakan berkas karena salah ketik atau salah format, informasi tersebut terlambat sampai ke mahasiswa, yang berujung pada hangusnya hak penyerapan anggaran pada semester berjalan (No Title, n.d.).

### **Dinamika Pengawasan Legislatif terhadap Kemacetan Dana Anggaran**

Memasuki pertengahan tahun berjalan, pelaksanaan Program SESAR memicu polemik sosial yang meluas di ruang publik. Gelombang keresahan mahasiswa penerima bantuan mulai mencuat ke permukaan melalui berbagai kanal media sosial akibat tidak adanya kejelasan lini masa terkait pencairan dana bantuan pendidikan. Keterlambatan realisasi ini sangat mengganggu stabilitas akademik para mahasiswa, mengingat dana beasiswa tersebut merupakan tumpuan utama mereka untuk membayar kelanjutan hak studi di universitas masing-masing. Merespons jeritan konstituen di akar rumput, Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mengambil tindakan pengawasan secara agresif terhadap eksekutif. Komisi C DPRD Bojonegoro melakukan pemanggilan resmi terhadap jajaran pimpinan Dinas Pendidikan guna melakukan klarifikasi mendalam dan mendesak dilakukannya percepatan distribusi anggaran. Sikap kritis legislatif ini dilandasi oleh kekhawatiran terjadinya maladministrasi serta potensi timbulnya kasus mahasiswa drop-out (putus kuliah) massal akibat kelalaian birokrasi dalam menepati janji pencairan. Desakan kuat dari parlemen daerah akhirnya memaksa Dinas Pendidikan Bojonegoro untuk segera memangkas prosedur birokrasi verifikasi berkas yang lamban dan secara resmi mengumumkan dimulainya tahapan pencairan dana beasiswa demi menjamin hak-hak keberlanjutan studi para mahasiswa (Anton et al., 2026).

### **Transisi Regulasi Menuju Perbup Nomor 42 Tahun 2025 dan Problem Eksklusi DTKS**

Sebagai bentuk resolusi atas berbagai kelemahan prosedur di masa lalu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan reformasi tata kelola hukum melalui pengundangan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 42 Tahun 2025. Lewat aturan terbaru ini, skema Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa dilebur secara struktural ke dalam satu klaster payung hukum terintegrasi, yaitu Beasiswa Keluarga Miskin (*PERBUB No 17, 2019*). Pengalihan ini secara teoritis berniat baik untuk mempertajam akurasi sasaran kebijakan (*targeting accuracy*) agar instrumen APBD daerah benar-benar membiayai kelompok ekonomi paling rentan, sekaligus meminimalisir risiko kebocoran anggaran kepada keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu (*inclusion error*). Namun, transisi regulasi ini membawa konsekuensi sosiologis dan

tantangan verifikasi yang sangat rumit di lapangan. Persyaratan mutlak bahwa calon pendaftar wajib terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menimbulkan celah pengecualian yang merugikan (exclusion error).

Realitas di perdesaan Bojonegoro menunjukkan bahwa proses pemutakhiran data kemiskinan sering kali berjalan lambat dan tidak dinamis. Banyak keluarga miskin riil di pelosok Bojonegoro yang secara faktual rumahnya tidak layak huni dan pendapatannya di bawah garis kemiskinan, namun nama mereka tidak tercatat dalam DTKS nasional akibat kesalahan input data oleh operator desa atau masalah administrasi kependudukan. Ketika sistem aplikasi beasiswa mengunci syarat DTKS secara kaku, anak-anak dari keluarga miskin riil tersebut secara otomatis langsung tereliminasi oleh sistem komputer sebelum sempat dinilai aspek akademiknya. Transformasi jaminan sosial pendidikan pasca-2025 ini memerlukan mekanisme pelaporan darurat (emergency jalan keluar) berbasis validasi faktual kepala desa agar tujuan mulia pencetakan sarjana di tiap desa tidak terhambat oleh kaku dan tidak akuratnya database kependudukan nasional.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro telah memberikan kontribusi positif yang signifikan secara makro terhadap peningkatan akses pendidikan tinggi dan akselerasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah. Meskipun kebijakan afirmatif ini berhasil meringankan beban finansial pemuda perdesaan untuk menempuh studi di perguruan tinggi, efektivitasnya pada level mikro masih menyisakan beberapa catatan kritis. Distribusi manfaat beasiswa terbukti belum merata secara spasial karena wilayah pelosok pinggiran mencatatkan angka serapan kuota yang jauh lebih rendah dibandingkan desa-desa maju akibat kendala kesiapan akademik dan keterbatasan akses informasi. Selain itu, prosedur pengajuan yang masih bersifat manual, keterlambatan lini masa pencairan dana, serta skema pembayaran berbasis kuitansi (reimbursement) menjadi hambatan birokrasi yang memberatkan pendaftar dari kelompok ekonomi paling rentan. Kondisi ini diperumit oleh adanya masa transisi regulasi melalui Perbup Nomor 42 Tahun 2025 yang melebur program ini ke dalam Beasiswa Keluarga Miskin, di mana penargetan kaku yang mengunci syarat kepesertaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berisiko memunculkan celah pengucilan bagi mahasiswa miskin riil akibat lambatnya pemutakhiran data administrasi kependudukan di tingkat desa.

Saran KebijakanGuna mengoptimalkan keberlanjutan dan ketepatan sasaran program jaminan pendidikan tinggi di Kabupaten Bojonegoro, berikut adalah rekomendasi taktis yang diajukan kepada pemangku kebijakan: Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro: Diharapkan segera merealisasikan digitalisasi pelayanan publik secara penuh melalui sistem aplikasi terpadu yang responsif. Selain itu, skema pembayaran perlu diubah dari sistem reimbursement (klaim mandiri) menjadi sistem kerja sama langsung (MoU) pembayaran ke rekening universitas mitra guna memutus hambatan modal awal mahasiswa miskin. Pemerintah Desa se-Kabupaten Bojonegoro: Harus proaktif melakukan pemutakhiran berkala terhadap data kemiskinan dan DTKS secara dinamis. Kepala desa perlu difasilitasi regulasi untuk memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) faktual sebagai katup penyelamat (emergency exit) bagi mahasiswa miskin riil yang namanya belum ter-input ke dalam database

nasional. Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro: Perlu memperketat fungsi pengawasan (monitoring) berkala terhadap linimasa pencairan anggaran oleh eksekutif agar keterlambatan penyaluran dana tidak kembali berulang dan mengancam status akademik mahasiswa di masa mendatang.

### **Daftar Pustaka**

- Anton, F., Kurniawan, A., Rahaju, T., & Prabawati, I. (2026). *Implementasi Program Beasiswa Sepuluh Sarjana PerDesa Menuju Sumber Daya Manusia Unggul di Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro*. 9(1), 180–197.
- Di, P., & Blora, K. (2023). *Implementasi Program Satu Desa Dua Sarjana Dalam Membantu Mencegah Kesenjangan Pendidikan Muhammad Habib Hussein, Ulul Abab, Zaenal Fatah SAP – Vol. 1 No. 3. Tahun 2023*. 1(3), 145–160.
- Kalpokaite, N. (2019). *Demystifying Qualitative Data Analysis for Novice Qualitative Researchers Demystifying Qualitative Data Analysis for Novice Qualitative Researchers*. 24(13), 44–57.
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remadja Karya. <https://books.google.co.id/books?id=YXsknQEACAAJ>
- No Title*. (n.d.). 1–15.
- Oktaviani, S. N., & Rosdiana, W. (2025). *Evaluasi Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro*. November.
- Sari, S. I., Studi, P., Pemerintahan, I., & Bojonegoro, K. (2026). *Optimalisasi Program Beasiswa Sepuluh sarjana Per Desa Dalam Mencetak Generasi Unggul Di Kabupaten Bojonegoro*. 01(January), 1–14.
- Waruwu, M. (2024). *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep , Prosedur , Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan*. 5, 198–211.
- Wijaya, H. (n.d.). *Ringkasan dan Ulasan Buku Analisis Data Penelitian Kualitatif ( Prof . Burhan Bungin )*. 1–45.
- Wijaya, H., Tinggi, S., & Jaffray, F. (2018). *Analisis Data Kualitatif Model Spradley*. March, 0–9.
- Wulandari, L., Kasiemi, S., Subandi, E., & Tjatur, K. (2025). *Implementasi Program Beasiswa Sepuluh Sarjana Per Desa di Kabupaten Bojonegoro*. 9(1), 39–45.